

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013-2017



Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2013–2017**

ISBN : 978-602-0966-61-8

Nomor Publikasi : 19040.1801

Katalog : 9302023.1904

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 82 halaman

Penyunting:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Naskah:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Desain Kover oleh:

BPS Kabupaten Bangka Tengah

Penerbit:

© BPS Kabupaten Bangka Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2013–2017**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah dan Penanggung Jawab : Agung Rachmadi, SE

Editor : M. Miftakhul Romadlon, SST

Penulis : Syamsu Pratama, SST

Desain Kover : Syamsu Pratama, SST

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

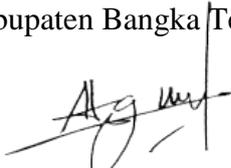
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota) pada periode waktu tertentu. Data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), perkembangan investasi fisik (ICOR), kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*)

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB dengan pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* sesuai rekomendasi *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan diucapkan terima kasih. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, masukan yang konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Koba, Agustus 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bangka Tengah,



Agung Rachmadi, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor dan Impor	27
III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013-2017	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	44
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	49
3.7 Perkembangan Ekspor dan Impor	51
IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN BANGKA TENGAH 2013-2017	55
4.1 PDRB (Nominal)	57
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	59
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	60
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	60

4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	62
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	63
4.7	Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan	63
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	64
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	66
V	PENUTUP	69
	LAMPIRAN	73

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Miliar Rupiah), 2013-2017 32
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Miliar Rupiah), 2013-2017 33
Tabel 3.3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 34
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 35
Tabel 3.5	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 36
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 38
Tabel 3.7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 40
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 41
Tabel 3.9	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017 42
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 43
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 45
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 47
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 49
Tabel 3.14	Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017 51

Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	58
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	59
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	60
Tabel 4.4	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	61
Tabel 4.5	Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	62
Tabel 4.6	Rasio PDRB Terhadap Impor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	63
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	64
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	65
Tabel 4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Miliar Rupiah), 2013-2017	33
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	37
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	39
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	44
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	45
Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	48
Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017	50
Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Persen), 2013-2017.....	52
Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan dan Peranan Impor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017.....	53
Gambar 4.1 PDRB per Kapita Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (Ribu Rupiah), 2013-2017	57
Gambar 4.2 Nilai Konsumsi Akhir (Miliar Rupiah) dan Peranan Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017	75
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017	76
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	77
Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	78
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	79
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	80
Lampiran 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	81
Lampiran 8. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	82

BAB I

PENDAHULUAN

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah sebagai indikator penting untuk memonitor perekonomian secara makro. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan perkapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Dalam perkembangannya, PDRB sudah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

PDRB dinilai menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan PDRB tipe ini sangat bermanfaat untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Penyusunan PDRB dapat menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu menurut pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.

A. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6.

Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

B. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Penyusunan PDRB terus mengalami penyempurnaan terutama dari segi cakupan data dan metodologi penghitungan yang digunakan. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan tahun dasar tahun tertentu, diganti sesuai dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia dan mengikuti saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengubah tahun dasar setiap 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, 2000, dan 2010. Mulai tahun 2015 digunakan

tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru
- Rekomendasi PBB tentang perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*)
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Dari perhitungan PDRB ADHB dan ADHK diperoleh tabel turunan PDRB seperti: distribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, indeks implisit, dan PDRB per kapita. Manfaat yang dapat diperoleh dari data-data tersebut antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

- PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor, yaitu: korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR). Sektor rumah tangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan nilai konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

A. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

B. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut 12 COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

- a) Makanan dan minuman non alkohol
- b) Minuman beralkohol dan rokok
- c) Pakaian dan alas kaki
- d) Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lain
- e) Furnitur, peralatan rumah tangga, dan perbaikan rutin rumah

- f) Kesehatan
- g) Transportasi/angkutan
- h) Komunikasi
- i) Rekreasi dan kebudayaan
- j) Pendidikan
- k) Penginapan, hotel, dan restoran
- l) Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- a) Makanan, Minuman, dan Rokok
- b) Pakaian dan Alas Kaki
- c) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- d) Kesehatan dan Pendidikan
- e) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- f) Hotel dan Restoran
- g) Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

C. Penghitungan PKRT Tahunan

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2) Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditas tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan

menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB masing-masing kelompok COICOP dengan IHK tahun dasar 2010 dari masing-masing kelompok COICOP yang sesuai.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - i) Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - ii) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
- b. Terhadap data poin a dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin b dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin d dengan hasil poin e.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

A. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal

yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi sosial (orsos), organisasi profesi (orprof), perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa (OBK).

B. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contohnya: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- Kompensasi tenaga kerja, contohnya: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contohnya: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

C. Penghitungan PKLNPRT Tahunan

1) Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2) Metode Penghitungan

Metode estimasi PKLNPRT menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKLNPRRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dilakukan menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara *men-deflate* PKLNPRRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir, sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

A. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

- Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

B. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup : a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, *social security*, *sports*, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya)
- Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, *Resource and Development*, dan sebagainya).

Pengeluaran pemerintah meliputi:

- Administrasi umum
- Pelayanan pemerintah (gratis atau hampir gratis) seperti pendidikan, kesehatan serta jasa lainnya
- Lembaga non profit yang utamanya dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah
- Pengeluaran pemerintah sebagai transfer berupa barang

- Belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana.

Klasifikasi ekonomi konsumsi akhir pemerintah meliputi:

- Konsumsi antara
- Balas jasa tenaga kerja
- Konsumsi barang modal
- Penjualan (output pasar/market output)
- Transfer berupa barang
- *Own account capital formation*
- *Gross capital formation (purchased) Subsidies*
- *Property income*
- *Social benefits other than in kind*
- Transfer berjalan lainnya
- Transfer modal/*capital*

C. Penghitungan PKP Tahunan

1) Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu atau DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan
- IHPB umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit PMTB, dan IHK umum dari BPS.

2) Metode Penghitungan

a. PKP Kabupaten/Kota ADHB

Secara umum, PKP ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

PKP ADHB =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank
Indonesia

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PKP Kabupaten/Kota ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PKP Kabupaten/Kota ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tidak diproduksi. Sementara perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas

bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang dikuasai oleh perusahaan.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

A. Konsep dan Definisi

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sementara pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Sebagai pengecualian, kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

B. Cakupan

Dalam publikasi ini, PMTB dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bangunan dan Non bangunan. PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang

bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, sistem persenjataan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

- Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

C. Penghitungan PMTB Tahunan

1) Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Hasil Survei Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah dari BPS.
- c. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- d. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Direktorat Statistik Industri (pada level provinsi).
- e. Laporan keuangan perusahaan.
- f. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- g. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- h. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian.
- i. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- j. Publikasi Statistik Konstruksi.
- k. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
- m. Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan.
- n. Statistik Kendaraan Bermotor, Samsat.
- o. Statistik Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

2) Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau suplai dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan cara PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (suplai), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang

berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. *Pertama*, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK digunakan metode deflasi yaitu dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan *kedua*, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB digunakan metode produksi dengan cara nilai PMTB ADHK tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK menggunakan metode deflasi yaitu dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sementara PMTB ADHK-nya diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADHK diperoleh

dengan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sementara data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai sub komponen investasi sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai komponen aset atau harta lancar perusahaan. Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

A. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

B. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran

untuk tujuan dijual;

- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

C. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1) Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan atau Dinas Pertanian.

2) Metode Penghitungan

Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara lebih rinci dan berkesinambungan.

a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK menggunakan metode deflasi dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari luar daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

A. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Pada dasarnya metode pengukuran jenis transaksi eksternal (baik antar negara maupun antar daerah) memiliki kesamaan prinsip, dalam artian yang satu akan menambah jumlah PDRB dan yang lainnya akan mengurangi jumlah PDRB. Perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam hal penilaian, karena menyangkut alat pembayaran.

B. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

C. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1) Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2) Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sementara Impor barang luar negeri ADHB dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sementara net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri ADHK dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB menurut jenis barang untuk ekspor-impor barang luar negeri dan IHK jasa untuk ekspor impor jasa luar negeri sebagai deflatornya.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2013-2017

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB III**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2013-2017**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 hingga 2017, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan kegiatan perdagangan. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan pendekatan PDRB menurut pengeluaran.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku setiap komponen pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut.

**3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN BANGKA TENGAH
MENURUT PENGELUARAN**

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output final (*final output*). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah digambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif selama

kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan jika perekonomian Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008 dan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah mampu bertahan dari perlemahan ekonomi nasional di tahun 2013-2015. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari terjadinya pembangunan ekonomi, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 479	3 916	4 330	4 942	5 549
2. Konsumsi LNPRT	35	41	49	57	63
3. Konsumsi Pemerintah	678	763	847	965	1 088
4. PMTB	1 302	1 517	1 682	1 956	2 221
5. Perubahan Inventori	166	92	75	56	43
6. Ekspor	3 595	3 918	2 860	3 117	3 894
7. Impor	3 058	3 556	2 788	3 622	4 887
PDRB	6 198	6 690	7 056	7 468	7 971

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pada tabel 3.1 dapat diketahui jika pada periode 2013-2017 PDRB atas dasar harga berlaku memiliki tren meningkat. Pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6.198 miliar rupiah dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.971 miliar rupiah. Jika dilihat perkomponen maka konsumsi rumah tangga memiliki sumbangsi terbesar terhadap PDRB ADHB. Pada tahun 2013 konsumsi rumah tangga menyumbang 3.479 miliar rupiah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah dan meningkat menjadi 5.549 miliar rupiah pada tahun 2017

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010). Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

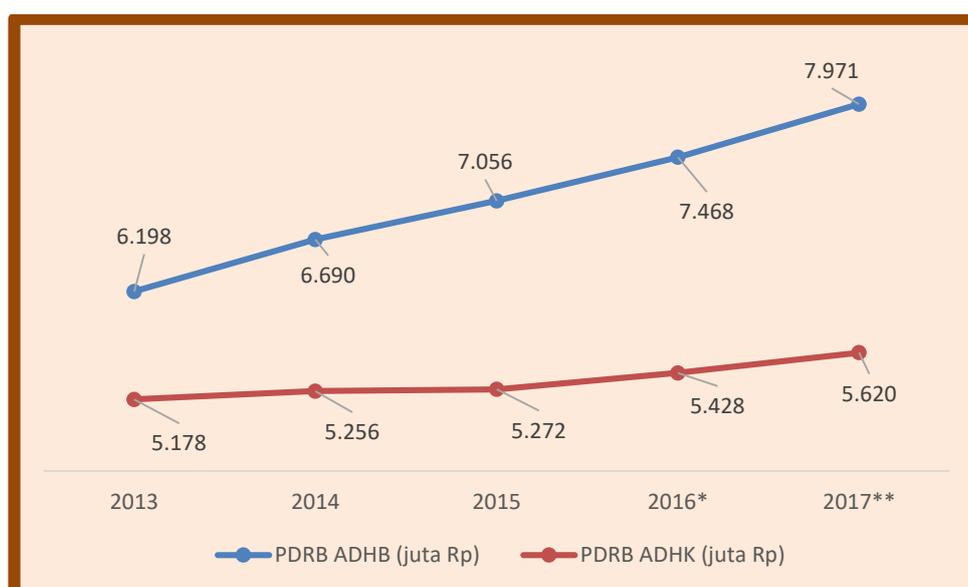
Selama tahun 2013-2017, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013 adalah sebesar 5.178 miliar rupiah, meningkat menjadi 5.620 miliar rupiah pada tahun 2017.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 864	3 045	3 213	3 460	3 648
2. Konsumsi LNPRT	29	33	35	39	41
3. Konsumsi Pemerintah	533	567	593	622	659
4. PMTB	1 058	1 113	1 1164	1 261	1338
5. Perubahan Inventori	113	90	75	53	54
6. Ekspor	3 135	3 335	2 408	2 372	2859
7. Impor	2 555	2 926	2 216	2 373	2980
PDRB	5 178	5 256	5 272	5 428	5 620

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (miliar rupiah), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Semakin lama perbedaannya semakin besar. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Semakin besarnya perbedaan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB tersebut.

Pembentukan PDRB tidak terlepas dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, produk barang dan jasa yang dihasilkan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (pada 5 tahun terakhir selalu di atas 50 persen). Peranan ekspor terhadap pembentukan PDRB juga relatif besar dengan kontribusi sekitar 40-58 persen. Sementara itu, untuk tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka Tengah akan produk dari wilayah lain dapat dilihat dari nilai impor yang juga cukup tinggi yaitu sekitar 39-61 persen dari total PDRB. Peranan net ekspor selama kurun waktu lima tahun terakhir kecenderungannya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi unggulan yang diekspor keberadaannya sudah semakin menurun.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	56,13	58,52	61,37	66,17	69,61
2. Konsumsi LNPRT	0,56	0,62	0,69	0,76	0,79
3. Konsumsi Pemerintah	10,94	11,41	12,01	12,92	13,65
4. PMTB	21,01	22,67	23,84	26,20	27,87
5. Perubahan Inventori	2,68	1,37	1,06	0,71	0,53
6. Ekspor	58,01	58,56	40,62	41,75	48,85
7. Impor	49,33	53,15	39,51	48,50	61,31
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 21-27 persen. Kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada kisaran 10-13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar, masih berada di bawah kontribusi konsumsi rumah tangga, ekspor, dan PMTB. Sementara itu, komponen yang peranannya paling kecil adalah konsumsi LNPRT, dimana kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Tengah berkisar antara 0,56 persen sampai dengan 0,79 persen selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,04	6,29	5,52	7,69	5,45
2. Konsumsi LNPRT	8,65	11,49	7,83	9,96	6,39
3. Konsumsi Pemerintah	7,54	6,37	4,68	4,80	6,13
4. PMTB	5,23	5,19	4,58	8,30	6,16
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-3,60	6,37	-27,79	-1,50	20,53
7. Impor	-1,49	14,55	-24,27	7,08	25,60
PDRB	3,30	1,50	0,31	3,05	3,45

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Agregat makro lainnya yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor. Selama tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah cenderung menunjukkan penurunan hingga tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 2,32 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,45 persen. Hal ini merupakan bukti jika kebijakan yang diambil telah tepat oleh pemerintah, dimana pemerintah berhasil membalik pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan hingga hanya mencapai 0,31 persen pada tahun 2015 menjadi 3,45 persen di 2017. Melambatnya pertumbuhan pada periode 2013-2015 tidak terlepas dari menurunnya kondisi ekspor dan perubahan inventori di Kabupaten Bangka Tengah. Tutupnya perusahaan pertambangan

dan industri pengolahan timah di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013 menyebabkan menurunnya produksi timah, sehingga persediaan dan ekspor komoditi timah yang merupakan andalan Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan yang cukup dalam. Ditambah juga lesunya perekonomian global di tahun 2015 yang ikut memperburuk kondisi yang ada. Namun pada tahun 2016, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan mulai meningkatnya laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,05 persen dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 3,45 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, agregat makro lainnya yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi/deflasi. Kenaikan perubahan harga yang terjadi di masyarakat disebut dengan inflasi, sedangkan perubahan harga yang menurun disebut dengan deflasi. Tingginya perubahan harga atau inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

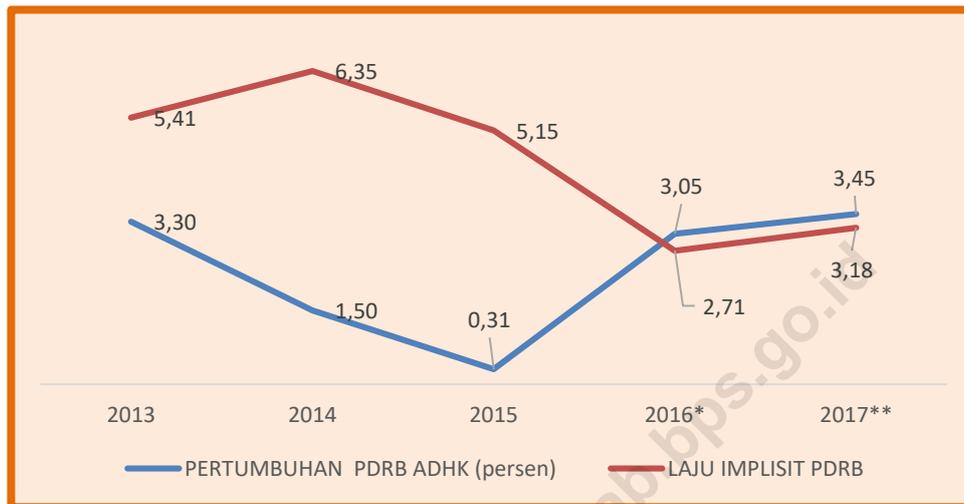
Tabel 3.5 Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,96	5,88	4,80	5,97	6,50
2. Konsumsi LNPRT	6,24	6,96	8,87	6,20	4,93
3. Konsumsi Pemerintah	8,74	5,80	6,07	8,69	6,26
4. PMTB	9,45	10,73	6,07	7,39	6,93
5. Ekspor	2,55	2,44	1,13	10,64	3,63
6. Impor	7,86	1,53	3,53	21,33	7,73
PDRB	5,41	6,35	5,15	2,71	3,18

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Penghitungan PDRB menghasilkan tingkat perubahan harga yang dikenal dengan *deflator* PDRB. *Deflator* PDRB didasarkan pada penghitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga *deflator* PDRB merupakan indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perubahan harga untuk berbagai komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB menurut pengeluaran merupakan perbandingan antara komponen-komponen PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2010. Laju indeks implisit PDRB yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) selama tahun 2013-2017 memiliki nilai positif dengan besaran yang berfluktuatif setiap tahunnya. Nilai laju implisit positif menunjukkan terjadinya peningkatan harga, begitu juga sebaliknya. Nilai laju indeks implisit tertinggi selama kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,35 persen sedangkan nilai laju implisit terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,71 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah menurut pengeluaran. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tercipta digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2013-2017, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan

nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,13 persen dan meningkat menjadi 69,61 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2017, nilai komponen konsumsi rumah tangga adalah sebesar 5.549 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 4.330 miliar rupiah.

Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga (RT)					
a. ADHB (juta rupiah)	3 479	3 916	4 330	4 942	5 549
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	2 864	3 045	3 213	3 460	3 648
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	56,13	58,52	61,37	66,17	69,61
Rata-Rata Konsumsi Perkapita/ Tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	20 071	22 095	23 937	26 752	29 424
b. ADHK 2010	16 524	17 180	17 760	18 730	19 343
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	6,04	6,29	5,52	7,69	5,45
c. Konsumsi perkapita	3,73	3,97	3,37	5,48	3,27
Jumlah Penduduk (000 orang)	173	177	181	185	189

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Membaiknya perkembangan ekonomi yang terjadi telah mendorong pendapatan dari rumah tangga ikut membaik, hal ini berdampak terhadap perbaikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu lima tahun terakhir. Secara nominal, satu orang di Kabupaten Bangka Tengah selama periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 satu orang menghabiskan dana sekitar 20,07 juta rupiah untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 29,42 juta rupiah pada tahun 2017. Sementara itu, dilihat atas dasar harga konstan 2010, selama periode tahun 2013-2017 rata-rata konsumsi rumah tangga per orang tumbuh pada kisaran antara 5-7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,69 persen. Hal ini dapat diartikan jika terjadi peningkatan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk sehingga secara umum dapat diartikan jika terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berdasarkan gambar 3.3 dapat diketahui jika pertumbuhan konsumsi perkapita paling lambat berada di tahun 2015 hal ini disebabkan pada tahun 2015 terjadi resesi ekonomi di Indonesia sehingga berdampak pada pola konsumsi masyarakat perkapita di Kabupaten Bangka Tengah yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun 2015 hanya 5,53 persen. Hal serupa juga terjadi di tahun 2017 pertumbuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah kembali menurun menjadi 5,45 persen hal ini disebabkan perlemahan ekonomi Negara Cina yang berdampak kepada naiknya harga bahan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan

nilai konsumsinya. baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita selama tahun 2013-2017 secara riil berkisar antara 5-7 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan dimana 6,04 persen pada tahun 2013 menjadi 5,45 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,69 persen. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan konsumsi perkapita yang cenderung mengalami Penurunan dari 3,73 persen pada tahun 2013 menjadi 3,27 persen pada tahun 2017 di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,48 persen. Terlihat bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara umum lebih sedikit lebih rendah dari peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah 3 persen.

Tabel 3.7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	44,80	44,61	45,19	45,84	46,48
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,91	3,97	3,90	3,67	3,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,76	15,66	15,60	16,01	15,73
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,21	5,21	5,26	5,18	5,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	19,06	19,65	19,14	18,43	18,17
f. Hotel dan Restoran	9,29	9,04	9,02	9,08	9,21
g. Lainnya	1,97	1,86	1,88	1,79	1,73
Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2013-2017 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok berada pada kisaran 44-46 persen dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 46,48 persen sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 44,61 persen. Perkembangan proporsi kelompok ini selama periode 2013-2014 mengalami penurunan

kontribusi namun pada tahun 2015-2016 kembali mengalami peningkatan. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan yang memiliki kontribusi cukup besar seperti; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga; dan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya cenderung menurun. Pergeseran pola proporsi konsumsi dari kelompok makanan ke non makanan ini menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,52	5,77	6,12	8,27	5,73
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,56	8,83	4,59	4,83	1,70
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,63	6,23	4,40	8,26	4,43
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,14	6,02	8,20	6,80	7,36
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,99	8,78	5,73	6,91	5,78
f. Hotel dan Restoran	1,63	3,45	2,72	7,67	5,75
g. Lainnya	5,72	4,04	6,36	5,53	4,34

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan riil-nya, pengeluaran rumah tangga baik untuk kelompok makanan maupun non makanan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berfluktuasi. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga secara kuantitas atau volume dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Perkembangan kelompok konsumsi makanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan kelompok konsumsi makanan pada tahun 2013 adalah sebesar 5,52 persen. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan kelompok konsumsi makanan mencapai 8,27 persen. Dampak dari penambahan jumlah penduduk juga mendorong pertumbuhan konsumsi kesehatan dan pendidikan, dimana pada tahun 2013 kelompok kesehatan dan pendidikan ini tumbuh sebesar 6,14 persen dan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 7,36 persen. Peningkatan

kelompok kesehatan dan pendidikan juga tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat melalui program-program seperti pengobatan gratis, pendidikan gratis dan sebagainya. Adapun untuk kelompok konsumsi lainnya mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa faktor musiman seperti liburan sekolah, perayaan hari besar keagamaan cukup kuat peranannya dalam membentuk pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Hal ini berarti setiap tahun rumah tangga membayar lebih mahal atas barang-barang yang dikonsumsinya, baik itu untuk kelompok makanan maupun non makanan. Jika hal ini tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, tentunya akan berakibat buruk bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,70	5,93	5,58	6,91	7,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,06	4,95	3,78	2,45	3,36
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,35	5,31	5,54	8,16	5,63
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,36	6,32	3,09	5,29	6,03
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,34	6,68	1,90	2,78	4,63
f. Hotel dan Restoran	7,67	5,86	7,41	6,69	7,75
g. Lainnya	7,12	1,51	5,59	2,72	3,98

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Dari berbagai komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran, konsumsi LNPRT merupakan komponen yang mempunyai kontribusi terkecil. Selama periode tahun 2013-2017, kontribusinya di bawah 1 persen. Kecilnya nilai kontribusi ini disebabkan belum banyaknya aktivitas lembaga sosial, kemasyarakatan, organisasi profesi, politik, dan sejenisnya di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, peran lembaga non profit perlu ditingkatkan. Pada saat ini telah ada berbagai upaya masyarakat serta sosialisasi di

lingkungan masyarakat itu sendiri, yang bertujuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan.

**Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (juta rupiah)	34 728	41 412	48 619	56 772	63 376
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	29 286	32 650	35 208	38 713	41 186
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,56	0,62	0,69	0,76	0,79

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Meskipun memiliki kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah, namun peranan konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Peranan yang diciptakan oleh komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2017 adalah sebesar 0,79 persen, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,76 persen. Pada tahun 2013, nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 34.728 juta rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi juta rupiah pada tahun 2016. Demikian halnya dengan nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan dari 29.286 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 41.186 juta rupiah pada tahun 2017. Secara rata-rata, selama kurun waktu 2013-2017, nilai konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Tengah meningkat sebesar 8,13 persen setiap tahunnya.

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi LNPRT Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara riil, laju pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT ini berfluktuatif selama kurun waktu tersebut, berkisar antara 6-11 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 11,49 persen. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 6,39 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi di suatu wilayah adalah permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah bisa terjadi karena adanya peningkatan permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi wilayah tersebut. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Selama tahun 2013-2017, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 678 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2017 mencapai 1.088 miliar rupiah.

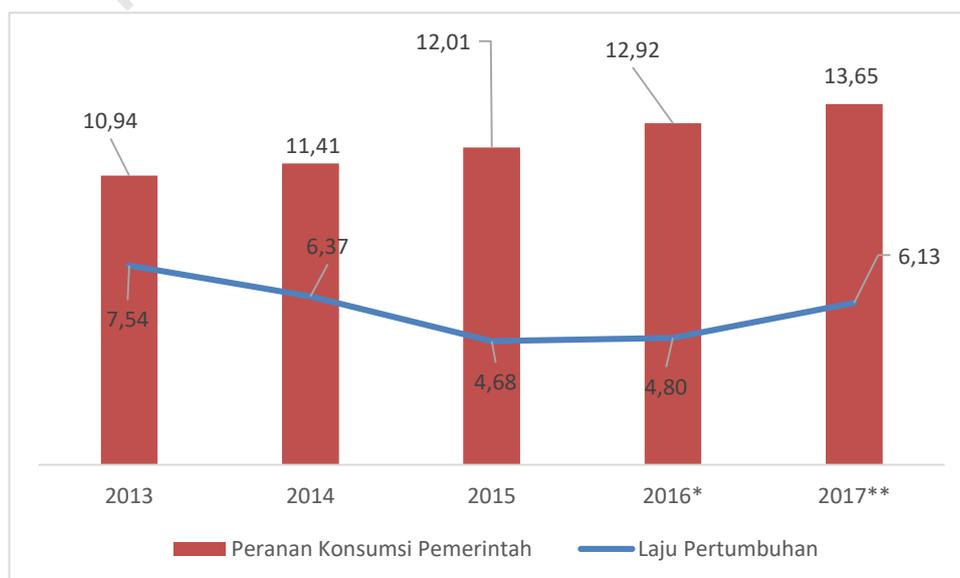
Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	678	763	847	965	1 088
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	533	567	593	621	660
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	10,94	11,41	12,01	12,92	13,65

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Demikian pula halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, pengeluaran akhir konsumsi pemerintah adalah sebesar 533 miliar rupiah, meningkat menjadi 660 miliar rupiah pada tahun 2017. Secara rata-rata, peningkatan konsumsi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 4,77 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas selama kurun waktu tersebut.

Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, peranan konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 10,94 persen, meningkat menjadi 11,41 persen pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 peranannya juga semakin meningkat, masing-masing sebesar 12,01 dan 12,92 persen. pada tahun 2017, peranan yang diciptakan komponen ini mencapai 13,65 persen.

Gambaran tentang peningkatan konsumsi akhir pemerintah secara riil merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Besarnya nilai konsumsi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2013-2017 dikarenakan sebagian kantor pemerintah provinsi terletak di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Perkembangan konsumsi pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah cenderung fluktuatif hal ini dapat di ketahui di gambar 3.5 pada tahun 2013 sebesar 7,54 persen, Laju pertumbuhan pada tahun 2013 ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 6,37 persen. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2015, laju pertumbuhannya sebesar 4,68 persen. Kemudian pada tahun 2016 pertumbuhannya juga tidak secepat tahun sebelumnya, namun tetap tumbuh positif sebesar 4,80 persen. Lalu pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 6,13 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Perkembangan pembangunan wilayah secara makro tidak terlepas dari perkembangan investasi. Investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti adanya peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan (*income*). Dalam waktu yang panjang investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi

investasi (fisik). PMTB dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik/kapital (selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga memiliki proporsi sekitar 21-27 persen terhadap total PDRB dan menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada tahun 2013, nilai PMTB Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 1.302 miliar rupiah, memberikan peranan sebesar 21,01 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Nilai PMTB mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2017 mencapai nilai sebesar 2.221 miliar rupiah atau memberikan peranan sebesar 27,87 persen terhadap total PDRB.

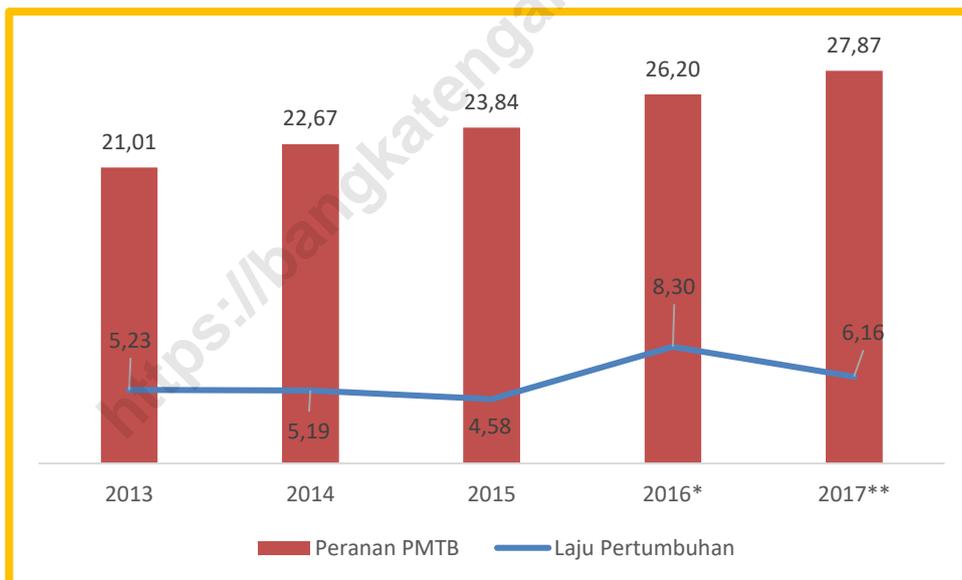
**Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	1 302	1 517	1 682	1 956	2 221
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	1 058	1 113	1 164	1 261	1338
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	21,01	22,67	23,84	26,20	27,87
Struktur PMTB					
a. Bangunan (miliar rupiah)	816	909	1 001	1 153	1319
(%)	62,64	59,94	59,51	58,94	59,38
b. Nonbangunan (miliar rupiah)	486	608	682	804	902
(%)	37,36	40,06	40,49	41,05	40,61
PMTB (miliar rupiah)	1 302	1 517	1 682	1 956	2 221
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	3,91	3,73	3,82	8,01	7,03
b. Nonbangunan	7,48	7,59	5,80	8,75	4,82
PMTB	5,23	5,19	4,58	8,30	6,16

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Secara riil, selama tahun 2013-2017 PMTB mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,89 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,30 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,58 persen. Nilai PMTB secara riil atau yang dihitung atas dasar harga konstan pada tahun 2013 adalah sebesar 1.058 miliar rupiah, mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 56 miliar per tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2017, nilai PMTB atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar 1.338 miliar rupiah.

Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan dan Peranan PMTB Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing sub komponen juga sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan sub komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto yaitu berkisar antara 59-62 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada sub komponen bangunan disebabkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal khususnya pembangunan gedung maupun renovasi gedung dan adanya proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang dianggarkan untuk beberapa tahun (*multiyears*) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Sementara pada sub komponen nonbangunan, pertumbuhan diantaranya disebabkan adanya penambahan

mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*).

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan sebagai persediaan barang pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sejenisnya. Sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan sebagai persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi/barang jadi, suku cadang, barang dalam perjalanan dan sejenisnya. Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	166	92	75	52	43
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	113	90	75	53	54
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	2,68	1,37	1,06	0,71	0,53

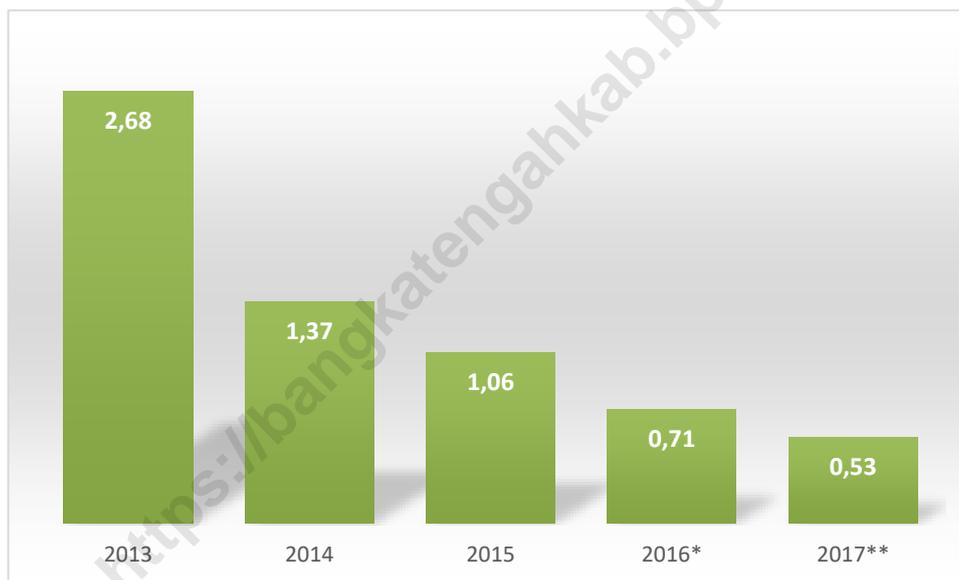
Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam

PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai perubahan inventori cenderung mengalami penurunan, baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013, nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku adalah sebesar 166 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2017, nilai perubahan inventori Kabupaten Bangka Tengah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 43 miliar rupiah.

Gambar 3.7 Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2013-2017, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dari 2,68 persen pada tahun 2013 menjadi 0,53 persen pada tahun 2016. Peranan perubahan inventori terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013 cukup tinggi disebabkan oleh tingginya produksi timah pada tahun tersebut. Seiring dengan menurunnya persediaan timah dan hasil industri logam timah di Kabupaten Bangka Tengah dan ditutupnya salah satu perusahaan timah di Kabupaten Bangka Tengah, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB juga semakin menurun. Proporsi perubahan inventori yang berada pada kisaran 1-3 persen menunjukkan distribusi atau pemasaran di Kabupaten Bangka Tengah masih berjalan dengan baik, di mana salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan inventori tersebut adalah komoditas ekspor seperti timah, CPO, karet dan lainnya.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR

Peran perdagangan antar wilayah cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya secara penuh akan berusaha mendatangkan barang dan jasa dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhan domestik juga terdorong untuk memperluas pemasarannya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa juga semakin meningkat, kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

Tabel 3.14 Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar rupiah)	3 595	3 918	2 861	3 118	3 894
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	3 058	3 556	2 408	2 372	2 859
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	58,01	58,56	40,54	41,75	48,85
Laju Pertumbuhan (%)	-3,60	6,37	-27,79	-1,50	20,53
Impor Barang dan Jasa					
a. ADHB (miliar rupiah)	3 135	3 335	2 788	3 622	4 887
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	2 555	2 926	2 261	2 373	2 980
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	49,33	53,15	39,51	48,50	61,31
Laju Pertumbuhan (%)	-1,49	14,55	-24,27	7,08	25,60

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perkembangan ekspor barang dan jasa di Kabupaten Bangka Tengah mengalami fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2013, nilai ekspor sebesar 3.595 miliar rupiah, menurun menjadi 3.894 miliar rupiah pada tahun 2017. Secara riil, nilai ekspor atas dasar harga konstan pada tahun 2013 adalah sebesar 3.058 miliar rupiah dan meningkat menjadi 2.859 miliar rupiah pada tahun 2017.

Gambar 3.8 Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017

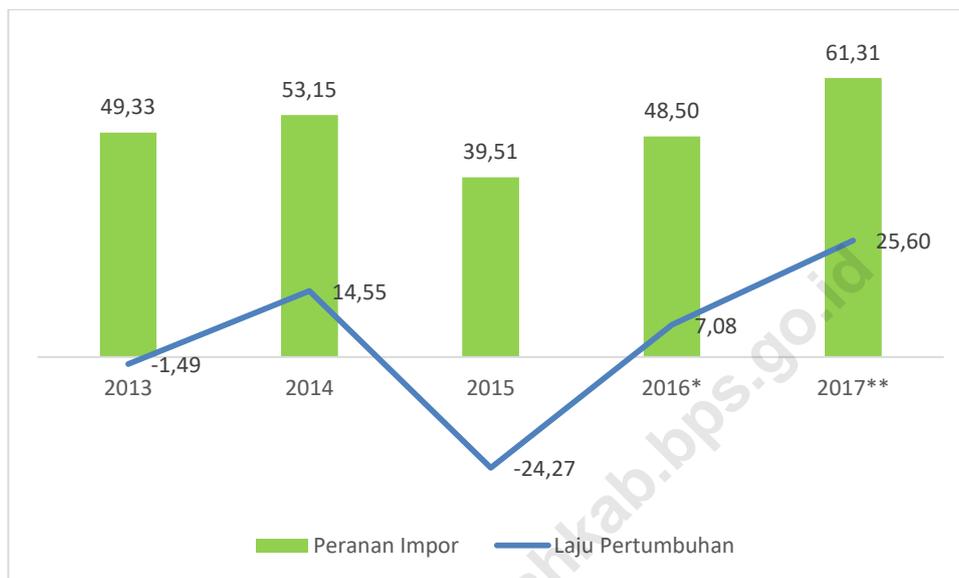


Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan ekspor di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, peranan ekspor terhadap PDRB adalah sebesar 58,01 persen, menurun menjadi 48,85 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya komoditas yang diekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Tengah, terutama komoditas timah. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekspor di Kabupaten Bangka Tengah bahkan mengalami kontraksi sebesar -27,79 persen.

Sementara itu, impor barang dan jasa selama kurun waktu 2013-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.595 miliar rupiah. Pada tahun 2017, impor mengalami penurunan menjadi 3.894 miliar rupiah. Proporsi impor barang dan jasa selama kurun waktu 2013-2017 berkisar antara 39-61 persen terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik di Kabupaten Bangka Tengah masih bergantung pada impor dari luar wilayah.

Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan dan Peranan Impor Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perkembangan impor selama 2013-2017 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan impor adalah sebesar -1,49 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 14,55 persen dan menurun kembali pada tahun 2015 sebesar -23,76 persen. Namun, pada tahun 2016, laju pertumbuhan impor barang dan jasa kembali mengalami kenaikan sebesar 6,55 persen dan meningkat cukup tinggi menjadi 25,60 persen pada tahun 2017

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
2013-2017

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH 2013-2017**

Dalam analisis sosial ekonomi, penggunaan data PDRB sebagai indikator ekonomi makro sering dilakukan di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Dari data PDRB dapat menghasilkan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis yang ada, seperti disajikan pada uraian berikut ini.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran akan menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran. Dari series data PDRB menurut pengeluaran tersebut dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Gambar 4.1 PDRB Perkapita Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bangka Tengah (ribu rupiah),
2013-2017**



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	6 198	6 690	7 056	7 469	7 972
b. ADHK 2010	5 178	5 256	5 272	5 433	5 620
PDRB perkapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	35 756	37 752	39 005	40 432	42 269
b. ADHK 2010	29 873	29 657	29 142	29 411	29 800
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	1,05	-0,72	-1,74	0,92	1,32
Jumlah Penduduk (000 orang)	173	177	181	185	189
Pertumbuhan (%)	2,23	2,23	2,08	2,11	2,16

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah. PDRB perkapita selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Secara nominal, PDRB perkapita pada tahun 2013 sebesar 35,76 juta rupiah dan di tahun 2017 meningkat menjadi 42,27 juta rupiah. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita secara riil menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2014-2015 dan kembali meningkat di tahun 2016 dan 2017. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2015 menyebabkan nilai PDRB perkapita pada kurun waktu tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,08 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,31 persen. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah mengalami kontraksi sebesar -1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Disebabkan resesi ekonomi dan tutupnya perusahaan besar di sektor pertambangan sehingga berdampak pada perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Namun pada tahun 2016 dan 2017, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, laju pertumbuhan PDRB perkapita naik sebesar 0,92 persen dan 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Bangka Tengah (rata-rata di atas 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain.

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	3 479	3 916	4 330	4 942	5 549
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 595	3 918	2 861	3 117	3 894
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap Ekspor	0,97	1,00	1,50	1,58	1,42

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa selama tahun 2013-2017 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga berkisar antara 0,97-1,58 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik digunakan untuk ekspor, sisanya diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,58 dan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,97. Selama periode tahun 2013-2017 rasio terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih besar daripada peningkatan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 yang menyajikan perbandingan konsumsi rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam kurun waktu 2013-2017, secara rata-rata rasio yang tercipta diatas 2. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia (*supply*) lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga sekitar 2 kali daripada permintaan untuk investasi fisik (PMTB). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah berkembang dengan tingkat konsumsi rumah tangga diatas investasi.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	3 479	3 916	4 330	4 942	5 549
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	1 302	1 517	1 682	1 956	2 221
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	2,67	2,58	2,57	2,53	2,50

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan rasio mengalami penurunan setiap tahunnya, kondisi ini menandakan bahwa permintaan untuk investasi fisik (PMTB) mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

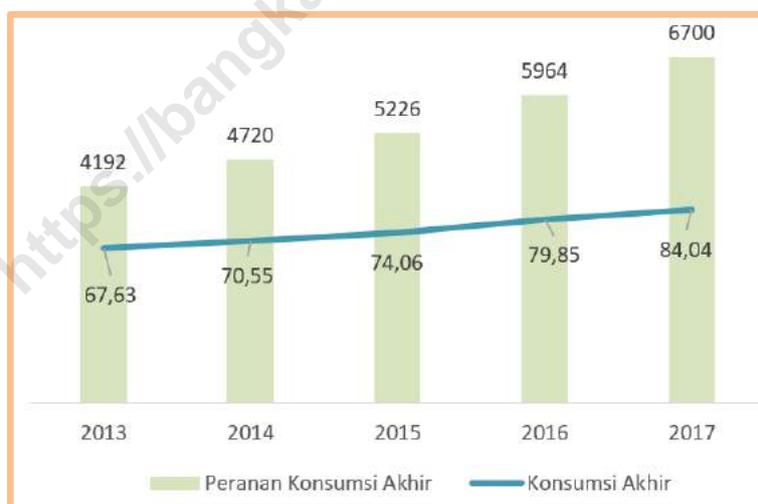
Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari domestik maupun impor) dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah Tangga	3 479	3 916	4 330	4 942	5 549
b. LNPRT	35	41	49	57	63
c. Pemerintah	678	763	847	965	1 088
Jumlah	4 192	4 720	5 226	5 964	6 700
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	6 198	6 690	7 056	7 469	7 972
Proporsi	0,68	0,71	0,74	0,80	0,84

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Gambar 4.2 Nilai Konsumsi Akhir (miliar rupiah) dan Peranan Terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2013-2017



Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (di atas 60 persen). Peningkatan konsumsi akhir setiap tahunnya dalam kurun waktu 2013-2017, diikuti peningkatan proporsinya terhadap PDRB. Pada tahun 2013, proporsi konsumsi akhir Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 67,63 persen, meningkat menjadi 84,04 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk yang dihasilkan untuk memenuhi konsumsi domestik. Dengan kata lain, produk yang tidak digunakan untuk konsumsi akhir,

antara lain untuk investasi fisik (PMTB) atau untuk dieskpor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki peran yang lebih kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di Kabupaten Bangka Tengah, tetapi diperdagangkan ke luar negeri atau luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5 Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 595	3 918	2 861	3 118	3 894
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	1 302	1 517	1 682	1 956	2 221
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	2,76	2,58	1,70	1,59	1,75

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2013-2017, produk domestik yang diekspor berkisar antara 1-3 kali dari PMTB. Pada tahun 2013 rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 2,76, kemudian pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan, pada tahun 2016 rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 1,59 namun pada tahun 2017 rasio ekspor terhadap PMTB naik menjadi 1,75. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio disebabkan oleh kenaikan ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Demikian pula sebaliknya, penurunan rasio disebabkan oleh penurunan ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah dengan produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB Kabupaten Bangka Tengah terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6 Rasio PDRB Terhadap Impor Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	6 198	6 690	7 056	7 469	7 972
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	3 058	3 556	2 789	3 622	4 887
Rasio PDRB Terhadap Impor	2,03	1,88	2,53	2,06	1,63

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2013-2017, rasio PDRB terhadap impor cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 rasio PDRB terhadap impor sebesar 2,03, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 1,88. Pada tahun 2015 rasio mengalami kenaikan menjadi 2,53 dan pada tahun 2016 turun kembali menjadi 2,06. Sementara itu pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan rasio menjadi 1,63.

4.7 KESEIMBANGAN PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah oleh produk yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, selama tahun 2013-2017 sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, provinsi lain atau kabupaten/kota lain, yaitu berkisar antara 28-35 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 65-72 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat

setiap tahunnya, dari 9.256 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 12.859 miliar rupiah pada tahun 2017.

**Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<u>Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)	6 198	6 690	7 056	7 469	7 972
(miliar rupiah)					
%	66,97	65,29	71,67	67,34	62,00
Impor (ADHB)	3 058	3 556	2 789	3 622	4 887
(miliar rupiah)					
%	33,03	34,71	28,33	32,66	38,00
<u>Permintaan Akhir</u>					
(miliar rupiah)	9 256	10 246	9 846	11 091	12 859
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Dari sisi penyediaan, produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 6,198 miliar rupiah pada tahun 2013, 6.690 miliar rupiah pada tahun 2014, 7.056 miliar rupiah pada tahun 2015, 7.469 miliar rupiah pada tahun 2016, dan 7.972 miliar rupiah pada tahun 2017.

Mengingat produk Kabupaten Bangka Tengah tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka untuk memenuhinya didatangkan berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain maupun kabupaten/kota lain yaitu sebesar 3.058 miliar rupiah pada tahun 2013, 3.556 miliar rupiah pada tahun 2014, 2.789 miliar rupiah pada tahun 2015, 3.622 miliar rupiah pada tahun 2016, dan 4.887 miliar rupiah pada tahun 2017.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Ekspor-impor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi, baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah atas barang dan

jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non residen yang berasal dari luar kabupaten/kota, baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56)

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Jika nilai ekspor positif dapat diartikan neraca perdagangan mengalami surplus. Sebaliknya, jika net ekspor negatif maka neraca perdagangan mengalami defisit.

Neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2013-2015 berdasarkan harga berlaku dan konstan mengalami surplus, namun kecenderungannya semakin menurun, hingga pada tahun 2016 mengalami defisit. Pada tahun 2013, neraca perdagangan memiliki surplus sebesar 581 miliar rupiah dan pada tahun 2015 hanya mencapai 192 miliar rupiah. Pada tahun 2017, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 122 miliar rupiah. Dengan kata lain, nilai impor Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 lebih besar dari pada nilai ekspor.

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 595	3 918	2 861	3 118	3 894
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	3 058	3 556	2 789	3 622	4 887
Net Ekspor (X – M) (miliar rupiah)	538	362	72	-504	-993
Peranan Net Ekspor (%)	8,68	5,41	1,02	-6,75	-12,46
Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	3 135	3 335	2 408	2 372	2 859
Impor (ADHK) (miliar rupiah)	2 555	2 926	2 216	2 373	2 981
Net Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	581	409	192	-1	-122
Laju Pertumbuhan Net Ekspor (%)	-11,90	-29,60	-53,02	-100,55	11449,17

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pertumbuhan net ekspor selama kurun waktu 2013-2017 mengalami penurunan yang cukup tajam. Net ekspor Sementara itu, pertumbuhan negatif dari komponen net ekspor terjadi pada tahun 2013-2016, yaitu sebesar -11,90 persen pada tahun 2013; -29,60 persen pada tahun 2014; -53,02 persen pada tahun 2015; -100,55 persen pada tahun 2016

dan 11449,17 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pertumbuhan positif namun hal ini disebabkan net ekspor pada tahun 2016 bernilai negatif sehingga meskipun net ekspor pada tahun 2017 menurun maka pertumbuhan akan terhitung positif. Hal ini disebabkan turunnya kuantitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan, yang mengakibatkan kegiatan ekspor barang dan jasa juga mengalami penurunan, terutama untuk komoditas timah. Jika dikaitkan dengan keadaan di lapangan, terjadinya penurunan nilai ekspor merupakan dampak tutupnya salah satu perusahaan pertambangan dan industri smelter di Kabupaten Bangka Tengah.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap penambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.9 Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Bangka Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	5 178	5 256	5 272	5 432	5 620
Perubahan (miliar rupiah)	165	78	16	160	188
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1 058	1 113	1 164	1 260	1 338
ICOR	6,41	14,27	72,75	7,88	7,11

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa selama tahun 2013-2015 besaran ICOR cenderung mengalami peningkatan dari 6,41 pada tahun 2013 hingga menjadi 72,75 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 nilai ICOR kembali mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 7,88 dan 7,11. Nilai ICOR sebesar 7,11 pada tahun 2017 menunjukkan bahwa untuk menaikkan output sebesar 1 miliar rupiah, membutuhkan investasi sebesar 7,11 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya, pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

BAB V

PENUTUP

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

- a. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013-2017 dapat menggambarkan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah pada periode bersangkutan. Berbeda dengan analisis ekonomi dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi, analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- b. Analisis yang disajikan merupakan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis tersebut didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dengan menambahkan beberapa indikator sosial demografi, seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai pemerintah, hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- c. Penyajian data dalam publikasi ini dalam bentuk series, yaitu dari tahun 2013-2017. Hal ini untuk memudahkan dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Satuan dari masing-masing parameter juga berbeda-beda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- d. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
- e. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*), provinsi lain ataupun kabupaten/kota secara agregat disajikan di sini, dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*), provinsi lain, maupun kabupaten/kota lainnya.

LAMPIRAN

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),
2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 479 284	3 915 603	4 330 177	4 941 662	5 549 489
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	1 558 890	1 746 719	1 956 996	2 265 401	2 579 633
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	136 133	155 484	168 759	181 231	190 506
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	548 172	613 252	675 672	791 172	872 734
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	181 158	204 201	227 766	256 117	291 528
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	663 022	769 429	828 993	910 837	1 008 136
1.6 Hotel dan Restoran	323 218	353 971	390 513	448 589	511 140
1.7 Lainnya	68 691	72 547	81 477	88 314	95 812
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	34 728	41 412	48 619	56 772	63 376
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	678 054	763 106	847 240	965 067	1 088 251
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 302 174	1 516 677	1 682 499	1 956 823	2 221 461
4.1 Bangunan	815 677	909 133	1 000 709	1 152 808	1 319 458
4.2 Nonbangunan	486 497	607 544	681 789	804 016	902 004
5. Perubahan Inventori	166 185	91 842	74 837	52 806	42 575
6. Ekspor	3 595 446	3 917 738	2 860 858	3 117 865	3 894 266
7. Impor	3 057 668	3 556 108	2 788 065	3 622 352	4 887 450
PDRB	6 198 203	6 690 270	7 056 165	7 468 643	7 971 968

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),
2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2 864 347	3 044 545	3 212 812	3 459 842	3 648 304
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	1 303 205	1 378 424	1 462 726	1 583 755	1 674 505
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	109 507	119 174	124 641	130 657	132 873
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	444 865	472 589	493 362	534 133	557 793
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	149 263	158 255	171 224	182 866	196 317
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	537 429	584 627	618 143	660 832	699 059
1.6 Hotel dan Restoran	261 166	270 183	277 521	298 802	315 977
1.7 Lainnya	58 912	61 293	65 194	68 797	71 780
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29 286	32 650	35 208	38 713	41 186
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	532 697	566 633	593 125	621 610	659 688
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 058 178	1 113 088	1 164 113	1 260 708	1 338 393
4.1 Bangunan	658 553	683 116	709 182	765 982	819 804
4.2 Nonbangunan	399 625	429 972	454 932	494 726	518 589
5. Perubahan Inventori	113 241	90 179	74 614	52 984	54 419
6. Ekspor	3 135 371	3 335 169	2 408 236	2 372 118	2 859 108
7. Impor	2 554 835	2 926 491	2 216 242	2 373 171	2 980 663
PDRB	5 178 285	5 255 773	5 271 866	5 432 805	5 620 435

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 3.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Persen), 2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,13	58,52	61,37	66,17	69,61
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	25,15	26,11	27,73	30,33	32,36
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	2,20	2,32	2,39	2,43	2,39
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,84	9,17	9,58	10,59	10,95
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	2,92	3,05	3,23	3,43	3,66
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,70	11,50	11,75	12,20	12,65
1.6 Hotel dan Restoran	5,21	5,29	5,53	6,01	6,41
1.7 Lainnya	1,11	1,08	1,15	1,18	1,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,62	0,69	0,76	0,79
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,94	11,41	12,01	12,92	13,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,01	22,67	23,84	26,20	27,87
4.1 Bangunan	13,16	13,59	14,18	15,44	16,55
4.2 Nonbangunan	7,85	9,08	9,66	10,77	11,31
5. Perubahan Inventori	2,68	1,37	1,06	0,70	0,53
6. Ekspor	58,01	58,56	40,54	41,75	48,85
7. Impor	49,33	53,15	39,51	48,50	61,31
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 4.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen), 2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,31	57,93	60,94	63,68	64,91
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	25,17	26,23	27,75	29,15	29,79
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	2,11	2,27	2,36	2,40	2,36
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,59	8,99	9,36	9,83	9,92
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	2,88	3,01	3,25	3,37	3,49
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,38	11,12	11,73	12,16	12,44
1.6 Hotel dan Restoran	5,04	5,14	5,26	5,50	5,62
1.7 Lainnya	1,14	1,17	1,24	1,27	1,28
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,62	0,67	0,71	0,73
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,29	10,78	11,25	11,44	11,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,44	21,18	22,08	23,21	23,81
4.1 Bangunan	12,72	13,00	13,45	14,10	14,59
4.2 Nonbangunan	7,72	8,18	8,63	9,11	9,23
5. Perubahan Inventori	2,19	1,71	1,42	0,98	0,97
6. Ekspor	60,55	63,46	45,68	43,66	50,87
7. Impor	49,34	55,68	42,04	43,68	53,03
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 5.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (persen), 2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14,48	12,54	10,59	14,12	12,30
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	13,64	12,05	12,04	15,76	13,87
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	17,30	14,21	8,54	7,39	5,12
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,70	11,87	10,18	17,09	10,31
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	15,01	12,72	11,54	12,45	13,83
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,91	16,05	7,74	9,87	10,68
1.6 Hotel dan Restoran	9,42	9,51	10,32	14,87	13,94
1.7 Lainnya	13,24	5,61	12,31	8,39	8,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,43	19,25	17,40	16,77	11,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,94	12,54	11,03	13,91	12,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,18	16,47	10,93	16,30	13,52
4.1 Bangunan	14,45	11,46	10,07	15,20	14,46
4.2 Nonbangunan	16,42	24,88	12,22	17,93	12,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-1,13	8,96	-26,98	8,98	24,90
7. Impor	6,26	16,30	-21,56	29,92	34,92
PDRB	8,88	7,94	5,47	5,85	6,74

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 6.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (persen), 2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,04	6,29	5,53	7,69	5,45
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	5,52	5,77	6,12	8,27	5,73
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	8,56	8,83	4,59	4,83	1,70
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,63	6,23	4,40	8,26	4,43
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	6,14	6,02	8,20	6,80	7,36
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,99	8,78	5,73	6,91	5,78
1.6 Hotel dan Restoran	1,63	3,45	2,72	7,67	5,75
1.7 Lainnya	5,72	4,04	6,36	5,53	4,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,65	11,49	7,83	9,96	6,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,54	6,37	4,68	4,80	6,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,23	5,19	4,58	8,30	6,16
4.1 Bangunan	3,91	3,73	3,82	8,01	7,03
4.2 Nonbangunan	7,48	7,59	5,80	8,75	4,82
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-3,60	6,37	-27,79	-1,50	20,53
7. Impor	-1,49	14,55	-24,27	7,08	25,60
PDRB	3,30	1,50	0,31	3,05	3,45

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 7.

Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),
2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	121,47	128,61	134,78	142,83	152,11
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	119,62	126,72	133,79	143,04	154,05
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	124,31	130,47	135,40	138,71	143,37
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	123,22	129,76	136,95	148,12	156,46
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	121,37	129,03	133,02	140,06	148,50
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	123,37	131,61	134,11	137,83	144,21
1.6 Hotel dan Restoran	123,76	131,01	140,71	150,13	161,76
1.7 Lainnya	116,60	118,36	124,98	128,37	133,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	118,58	126,84	138,09	146,65	153,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127,29	134,67	142,84	155,25	164,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	123,06	136,26	144,53	155,22	165,98
4.1 Bangunan	123,86	133,09	141,11	150,50	160,95
4.2 Nonbangunan	121,74	141,30	149,87	162,52	173,93
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	114,67	117,47	118,79	131,44	136,21
7. Impor	119,68	121,51	125,80	152,64	163,97
PDRB	119,70	127,29	133,85	137,47	141,84

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Lampiran 8.

Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),
2013–2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,96	5,88	4,80	5,97	6,50
1.1 Makanan, Minuman dan Rokok	7,70	5,93	5,58	6,91	7,70
1.2 Pakaian dan Alas Kaki	8,06	4,95	3,78	2,45	3,36
1.3 Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,35	5,31	5,54	8,16	5,63
1.4 Kesehatan dan Pendidikan	8,36	6,32	3,09	5,29	6,03
1.5 Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,34	6,68	1,90	2,78	4,63
1.6 Hotel dan Restoran	7,67	5,86	7,41	6,69	7,75
1.7 Lainnya	7,11	1,51	5,59	2,72	3,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,24	6,96	8,87	6,20	4,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,74	5,80	6,07	8,69	6,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,45	10,73	6,07	7,39	6,93
4.1 Bangunan	10,14	7,45	6,03	6,66	6,94
4.2 Nonbangunan	8,32	16,07	6,06	8,44	7,03
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	2,55	2,44	1,13	10,64	3,63
7. Impor	7,86	1,53	3,53	21,33	7,43
PDRB	5,41	6,35	5,15	2,71	3,18

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bangkatengahkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah

Jl. Raya Bypass, Koba 33681

Telp. (0718) 7362084, Fax. (0718) 7362085

Homepage: bangkatengahkab.bps.go.id, Email: bps1904@bps.go.id

ISBN 978-602-0966-61-8

